

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa wisata adalah salah satu jenis pariwisata yang menjadikan desa dan komponen di dalamnya sebagai destinasi. Desa wisata merupakan integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku (Wiendu, 1993). Desa wisata memberi layanan kepada sekelompok kecil wisatawan yang menetap/tinggal dalam suasana tradisional, biasanya di desa-desa terpencil dan belajar tentang kehidupan pedesaan dan lingkungan setempat (Inskeep, 2014). Dengan demikian desa wisata tidak hanya menekankan kegiatan wisata di objek wisata itu sendiri, tetapi juga menekankan interaksi wisatawan dengan masyarakat setempat.

Pariwisata dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat setempat sehingga pengembangan desa wisata harus diperhatikan agar menghasilkan manfaat yang optimal. Pengembangan desa wisata merupakan bentuk kebijakan pembangunan pedesaan yang mencoba melakukan diversifikasi desa yang biasanya berbasis kepada pertanian (Herdiana, 2019). Pada tahun 2021, kami melakukan evaluasi terhadap 451 desa dan kampung wisata peserta BCA Desa Wisata Award yang diselenggarakan oleh PT Bank Central Asia. Kemudian, pada tahun 2022, kami juga melakukan evaluasi terhadap 85 desa/kampung di Jawa

Barat dalam rangka Dewi Jawara Award 2022 yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil evaluasi, sekitar 85-90% desa/kampung ditemukan memiliki isu yang sama, yaitu potensi wisata yang belum dikembangkan secara optimal.

Pariwisata dapat memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi setempat, namun seringkali kurang ada pertimbangan dimensi keberlanjutan dalam tindakan pengelolaannya (Melo dkk., 2022). Perkembangan kegiatan pariwisata dari tahun ke tahun akan membawa tantangan kepada semua aktor dalam sektor pariwisata untuk merencanakan bagaimana mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan (Melo dkk., 2022) terutama dalam pengelolaan sampah dan gunalahan. Pada masa liburan, objek wisata mengalami peningkatan volume sampah hingga 30% dibandingkan hari-hari biasa (jabar.tribunnews.com, 2023). Pada sisi lain, pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata akan mengubah gunalahan desa yang jika tidak dikendalikan akan mempengaruhi kualitas alam dan pemandangan desa. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, rancangan pengelolaan dan pengembangan desa wisata ke depannya perlu dilakukan secara berkelanjutan. Wisatawan dunia juga mulai menyadari pentingnya keberlanjutan, seperti yang tercantum dalam Sustainable Travel Record 2022 dari *Booking.com*. Hasil survei terhadap 30.000 wisatawan dari 32 negara menyebutkan 81% responden menganggap *sustainable travel* penting bagi mereka. Sekitar 50% dari mereka juga menyatakan isu perubahan iklim menjadi pertimbangan untuk membuat pilihan perjalanan yang lebih berkelanjutan.

Berkelanjutan disini memiliki makna bahwa model pariwisata nantinya lebih ramah lingkungan, dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan budaya, serta dapat memaksimalkan dampak positif terhadap ekonomi bagi masyarakat. Arida (2014) menyatakan bahwa pariwisata berkelanjutan merupakan suatu konsep pembangunan pariwisata yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dalam UU nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 4, penyelenggaraan kepariwisataan bukan hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, dan mengatasi pengangguran, namun juga harus memperhatikan tujuan untuk melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, serta memajukan kebudayaan.

Penyelenggaraan desa wisata membutuhkan keberadaan pengelola yang berfungsi secara efektif dapat terhubung dengan *stakeholder* lain sebagai bagian dari sistem pengelolaan yang lebih luas. Pengelolaan yang efektif dapat membantu memenuhi setiap aspek berkelanjutan dalam pengembangan pariwisata. Seperti dalam upaya pengelolaan sampah, Joseph dkk (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “*Sustainable Tourism Development in The Backwaters of South Kerala, India: The Local Government Perspective*”, menyebutkan bahwa pengelolaan sampah yang tidak tepat merupakan tantangan terbesar di destinasi wisata karena dapat menghambat destinasi mencapai pembangunan pariwisata berkelanjutan. Untuk menangani hal tersebut, diperlukan penekanan peran berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk memperkuat upaya menuju pariwisata berkelanjutan. Penelitian lainnya dari

Ghaderi dan Henderson (2012) menyebutkan bahwa meskipun masyarakat menghargai konsep pariwisata berkelanjutan, jika konsep tersebut masih belum dipraktikkan dengan baik oleh industri swasta, pemerintah, maupun sesama penduduk desa maka penerapannya tidak maksimal.

Adanya peran masyarakat dalam menginisiasi dan mengembangkan pariwisata akan membentuk aktivitas desa wisata yang sesuai dengan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat (Jamieson, 2006). Adawiyah dkk (2017) dalam tulisannya yang berjudul “Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Rural Tourism*)”, menyebutkan kendala sumber daya manusia (SDM) menjadi permasalahan dalam setiap aktivitas pengembangan desa wisata. Oleh karena itu, tingkat pemahaman masyarakat tentang pariwisata nantinya harus diatasi untuk mengembangkan pariwisata (Ghaderi & Henderson, 2012). Hal ini dapat diatasi dengan tata kelola pariwisata yang baik dimana melibatkan masyarakat dengan menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Ira & Muhammad, 2019; Purnomo dkk., 2019).

Kasus yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Desa Mukapayung, berada di Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Desa Mukapayung merupakan salah satu desa yang memiliki banyak situs geologi dan budaya yang dapat dikembangkan sebagai atraksi wisata. Namun atraksi dan sarana pendukungnya belum dikembangkan dengan baik serta masih kurang memadai. Pada sisi lain, masyarakat setempat, melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), sudah mulai menyadari isu keberlanjutan potensi-potensi wisata mereka, tetapi kapasitas Pokdarwis masih terkendala terutama dari keterbatasan sumber daya manusia

meskipun jumlah penduduk yang tidak bekerja tercatat sebanyak 3759 jiwa (Profil Desa Mukapayung, 2022). Selain itu, Desa Mukapayung belum punya sistem atau kebijakan untuk mengkonservasi potensi alam dan budaya mereka. Pengembangan potensi destinasi secara berkelanjutan di Desa Wisata Mukapayung diharapkan dapat terus mempertahankan pariwisata sebagai bagian dari pengembangan desa.

Untuk menyusun pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, dibutuhkan pemahaman terhadap faktor-faktor penting yang ada di destinasi. Untuk itu, diperlukan suatu panduan berupa standar keberlanjutan yang berlaku secara global. Seiring dengan studi-studi yang telah dilakukan, konsep yang membuktikan aspek keberlanjutan dalam pariwisata masih terus dikembangkan agar menjadi panduan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Dodds & Joppe, 2001; Purvis dkk, 2019; Agyeiwaah dkk, 2022). Dilakukannya identifikasi terhadap serangkaian indikator inti akan menjadi faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi pariwisata Desa Mukapayung. Faktor ini nantinya dapat membantu penyusunan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terlibat dalam industri pariwisata (Salim, 1990; Purvis dkk, 2019). Salah satu standar berkelanjutan yang dijadikan acuan adalah kriteria destinasi berkelanjutan dari *Global Sustainable Tourism Council* (GSTC). Seperti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wolo dkk (2022) menilai penerapan standar berkelanjutan sesuai kriteria GSTC, namun belum dirumuskan alternatif tindak lanjutnya. Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian yang dilakukan oleh Wolo dkk

(2022), dimana akan dilakukan identifikasi faktor-faktor pariwisata di Desa Mukapayung agar dapat dirumuskan strategi utama pengembangan desa wisata yang memenuhi standar berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, temuan awal dan studi-studi pendukung yang telah dibahas dari bagian sebelumnya, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

“Apa saja kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengembangan pariwisata Desa Mukapayung yang berkelanjutan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di Desa Wisata Mukapayung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, hasil penelitian diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan secara akademis dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah pemahaman tentang pengembangan desa wisata berkelanjutan di Desa Wisata Mukapayung.
2. Memperkaya kajian tentang pengembangan desa wisata berkelanjutan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan solusi bagi para pengelola Desa Wisata Mukapayung dalam mengembangkan potensi-potensi destinasi melalui konsep berkelanjutan dengan menyusun rencana pengelolaan yang ramah lingkungan, pengembangan sosial dan budaya, serta berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.